

PENGEMBANGAN KURIKULUM BERBASIS MADRASAH

Oleh
Muhammad Nasir¹

ABSTRAK;

Desentralisasi pendidikan di Indonesia memberikan suasana baru dalam pengelolaan dan pengembangan kurikulum madrasah, terlebih lagi setelah diberlakukan Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan (KTSP). Perubahan tersebut meliputi perpindahan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan atas pengembangan kurikulum dari yang bersifat terpusat oleh pemerintah menjadi kewenangan yang ada pada masing-masing sekolah/madrasah. Para guru dan seluruh komponen madrasah menuntut lebih banyak kebebasan dalam menentukan kurikulum di madrasah oleh warga madrasah. Tuntutan tersebut karena, model pengembangan kurikulum selama ini adalah *centre based or top down*, yaitu kebijakan yang sepenuhnya ditentukan oleh pusat, hanya sedikit otonomi bagi madrasah dalam proses pengembangan kurikulum.

Tulisan mencoba mengeksplor tentang bagaimana hakekat, prosedur dan langkah-langkah pengembangan kurikulum yang berbasis kepentingan madrasah. Termasuk bagaimana mengembangkan kurikulum ideal yang mengintegrasikan pendidikan umum dan pendidikan agama.

Kata Kunci : Pengembangan, Kurikulum dan Madrasah

PENDAHULUAN

Madrasah sebagai lembaga pendidikan yang berciri khas Islam banyak menarik perhatian oleh berbagai kalangan terutama para pemerhati Pendidikan. Ketertarikan para pemerhati pendidikan ini disebabkan oleh banyak hal di antaranya; 1) posisi madrasah sangat strategis dan vital dalam membina generasi

¹ Penulis adalah dosen tetap Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN Samarinda Kalimantan Timur. Saat ini sedang studi lanjut di PPS Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung dengan program Studi Pengembangan Kurikulum.

bangsa yang jumlah peserta didiknya sangat signifikan; 2) Secara kuantitas, madrasah di Indonesia baik negeri maupun swasta mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan menyebar di seluruh wilayah Republik Indonesia dan 3) Adanya anggapan bahwa madrasah seakan-akan tersisih dan termarginalkan dari mainstream pendidikan nasional dan dianggap sebagai pendatang baru yang dianggap banyak mengalami masalah dalam hal mutu, manajemen dan kurikulum.

Di sisi lain, perubahan yang besar terjadi di sekitar pendidikan Islam, yang mau tidak mau, madrasah harus menghadapinya dan mengharuskan terjadinya perubahan agar pendidikan Islam termasuk madrasah menjadi salah satu alternatif pilihan atau bahkan menjadi pilihan utama oleh masyarakat Indonesia. Madrasah sebagai lembaga pendidikan yang lahir dari, dan untuk masyarakat harus secepat mungkin melakukan pembenahan diri dalam menjawab tuntutan masyarakat dan dunia.

Untuk merespon tuntutan masyarakat dan menjaga jati diri madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang berkualitas dan memiliki ciri khas Islam, menurut Malik Fajar (2004 : 8) madrasah harus mengembangkan program seperti ; memberikan nuansa Islam atau spritualisasi bidang studi umum, pengajaran bidang studi agama Islam yang bernuansa IPTEK dan menciptakan suasana keagamaan di madrasah terutama dalam pembelajaran mafikibi (matematika, fisika, kimia dan biologi) yang agamis dalam perilaku siswa. Lebih jauh, Malik Fajar mengatakan bahwa madrasah dapat menjadi pendidikan alternatif jika memenuhi empat tuntutan yaitu; kejelasan cita-cita dengan langkah yang operasional dalam usaha mewujudkan cita-cita pendidikan Islam, memberdayakan kelembagaan dengan menata kembali sistemnya, meningkatkan dan memperbaiki manajemen dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Sementara itu, menurut Husni Rahim bahwa ada empat agenda besar yang perlu dilakukan madrasah agar segera menjadi madrasah unggul dan dambaan masyarakat yaitu ketersediaan tenaga pengajar yang profesional, kelengkapan sarana dan prasarana, adanya penanganan dengan sistem manajemen profesional (modern, transparan dan demokratis) dan adanya kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Salah satu hal yang penulis ingin garis bawahi tentang pandangan Husni Rahim di atas adalah “madrasah harus memiliki kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat jika ingin sebuah madrasah menjadi madrasah unggulan dan dambaan masyarakat”. Pandangan ini perlu penjabaran lebih jauh dan operasional agar kurikulum yang diinginkan betul-betul merupakan hasil seleksi kebutuhan masyarakat. Berkaitan dengan ini, maka semestinya, pengembangan kurikulum madrasah dilakukan dengan berbasis kebutuhan madrasah dan masyarakat di sekitarnya atau Pengembangan Kurikulum Berbasis Sekolah dengan meminjam Istilah Laurie Brady (1947 : 3-17) dalam bukunya *Curriculum Development in Australia* atau Murry Print (1993 : 19-23) dalam bukunya *Curriculum Development*

and Design. Dalam tulisan ini akan dikemukakan bagaimana konsep dan prosedur Pengembangan Kurikulum Berbasis Sekolah/Madrasah, keuntungan dan kekurangannya, kendala pelaksanaannya, dan alternatif pengembangan ciri khas madrasah unggulan yang diawali dengan pengantar seputar pengertian dan sejarah berdirinya madrasah serta perkembangan madrasah di Indonesia.

B. PENGERTIAN DAN SEJARAH BERDIRINYA MADRASAH

Kata madrasah berasal dari “*darasa*” yang berarti belajar. Kata ini kemudian di-*tashrif* dalam bentuk *isim makan* (kata yang menunjuk pada tempat) menjadi *madrasah* yang berarti tempat belajar baik bagi murid yang level (TK, SD/MI, SMP/MTS/SMU/MA) rendah maupun level tinggi (Perguruan Tinggi). Makna lain dari “*darasa*” adalah terhapus, hilang bekasnya, menjadikan usang, melatih dan mempelajari. Luis Ma’luf (1986 : 187). Berdasarkan arti madrasah tersebut, maka diketahui bahwa istilah madrasah merupakan tempat untuk mencerdaskan para peserta didik, menghilangkan ketidaktahuan, atau memberantas kebodohan mereka serta melatih keterampilan mereka sesuai bakat, minat dan kemampuannya. Madrasah juga tidak hanya diartikan sebagai sekolah dalam arti sempit, tetapi juga bisa dimaknai dengan rumah, istana, *kuttab*, masjid, perpustakaan, surau dan tempat-tempat lainnya. Bahkan seorang ibu dapat dikategorikan sebagai *al-madrasah al’ula*.(madrasah pemula). Al-Hasyimi (1985 : 200)

Secara historis menurut Al-Maqrizi, madrasah tidak dikenal pada masa sahabat dan tabi’in. Ia diciptakan sesudah 400 tahun setelah Hijriyah. Dalam perkembangannya, pemakaian istilah “madrasah” secara definitive baru muncul pada abad- 11 M. Penjelmaan istilah “madrasah” merupakan transformasi dari masjid ke madrasah. Ada beberapa teori yang berkembang seputar seputar transformasi ini, di antaranya ; pandangan Ahmad Syalabi (1954) menjelaskan bahwa madrasah merupakan transformasi institusi pendidikan Islam dari masjid ke madrasah terjadi secara langsung sebagai konsekuensi logis dari semakin ramainya kegiatan yang dilaksanakan di masjid yang tidak hanya dalam kegiatan ibadah *mahdhah*, tetapi juga dalam bentuk ibadah *ijetima’iyah*. Sementara itu, meskipun ada yang beranggapan bahwa peralihan dari masjid ke madrasah itu terjadi secara tidak langsung. Ahmad Syalabi (1954 : 257-259)

Terjadi perbedaan pendapat tentang madrasah yang pertama berdiri di dunia Islam. Di antara pandangan tersebut adalah ; 1) madrasah sebagai lembaga pendidikan formal telah dikenal adanya “Madrasah Nidzamiyah” di Bagdad yang didirikan oleh **Nidzam al-Muluk** seorang wazir dari dinasti Saljuk pada awal abad ke-11 M. atau Tahun 457 H., 2) menurut al-Jumbulati (1994) bahwa sebelum abad ke-10, madrasah yang pertama berdiri adalah madrasah al-Baihaqiah di kota

Nisabur yang didirikan oleh Abu Hasan al-Baihaqi (w. 414 H). 3) Menurut Richard Bulliet (1972) bahwa madrasah Miyan Dahiyah di Nisapur berdiri dua abad sebelum berdirinya madrasah Nizyamiyah di Bagdad yang mengajarkan fiqh malikiyah. Suwito (2004 : 214-215).

Terlepas dari perbedaan pendapat tentang madrasah yang pertama berdiri di dunia Islam, namun madrasah Nidzam al-Muluk adalah madrasah yang paling populer di kalangan ahli sejarah dan masyarakat Islam. Menurut Mehdi, meskipun madrasah Nidzal al-Muluk bukan sebagai madrasah yang pertama didirikan, namun madrasah ini memiliki spirit ilmu pengetahuan yang tinggi, baik dari tujuan politik dan agama. Dan yang paling menarik adalah proses pendirian madrasah ini mendapat dukungan dari berbagai pihak yaitu pemerintah, ulama-ulama, dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa madrasah Nidzamiyah ini didirikan atas kemauan dan keinginan bersama bukan keinginan sepihak.

Sementara madrasah dalam konteks Indonesia, pada dasarnya merupakan fenomena modern yang baru muncul pada abad 20 M, karena pada masa awal masuk dan berkembangnya Islam, masyarakat Islam masih menggunakan rumah-rumah, langgar, surau, masjid dan kemudian berkembang menjadi pesantren sebagai tempat belajar. Dalam perkembangan selanjutnya, madrasah di Indonesia lahir sebagai hasil tarik menarik antara pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam pada masa awal yang sudah ada di satu sisi dengan pendidikan modern (umum) di sisi lain. Di antara para ulama yang berjasa dalam mendirikan madrasah di Indonesia adalah Syekh Abdul Karim yang mendirikan madrasah Thawalib di Padang Panjang, H. Abd. Somad mendirikan madrasah Nurul Iman (1913) di Jambi, Madrasah Sa'adah Adabiyah didirikan Teungku Daud Beureueh di Aceh (1930), dan ulama lainnya melakukan hal yang serupa di berbagai tempat di Indonesia. Sementara ulama yang mengembangkan kemudian di antaranya; Syekh Amrullah Ahmad (1907) di Padang, K.H. Ahmad Dahlan (1912) di Yogyakarta, K.H. Wahab Hasbullah bersama K.H. Mansyur (1914) di Surabaya dan lain-lain . Abdurrahman Shaleh (2005 : 18-20).

Pada masa awal berdiri dan berkembangnya madrasah di Indonesia, tanpanya mengalami masa sulit. Pada awal kemerdekaan, madrasah terus hidup dan berkembang, tetapi tidak memperoleh bantuan sepenuhnya dari pemerintah. Madrasah dan dunia pendidikan Islam lainnya pada umumnya dibiarkan hidup apa adanya. Perhatian pemerintah hanya sebatas memberikan dorongan moril saja. Namun, dalam perkembangannya, madrasah tidak lagi menjadi lembaga pendidikan yang termarginalkan, tetapi madrasah telah menjadi Sub Sistem Pendidikan Nasional yang tentu saja tidak akan berbeda dengan kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional. Dengan demikian, pembangunan pendidikan di madrasah akan mengacu pada empat hal yaitu pemerataan, relevansi, kualitas dan efisiensi.

Pemberlakuan UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah dan Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000, tentang kewenangan pemerintah daerah, semakin membawa angin segar dan konsekuensi yang cukup signifikan dalam pengelolaan pendidikan termasuk pengelolaan madrasah. Kebijakan ini merupakan upaya pemberdayaan madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan, terarah dan menyeluruh. Meskipun Undang-Undang otonomi daerah tidak menghapus sama sekali kewenangan pusat dalam mengatur pendidikan di setiap satuan pendidikan termasuk madrasah, maka semestinya madrasah menangkap semangat desentralisasi pendidikan ini dengan memberdayakan seluruh potensinya dalam mengatur dan mengelola dirinya sendiri, termasuk dalam mengembangkan kurikulumnya sendiri. Hasbullah (2007 : 17)

C. KONSEP PENGEMBANGAN KURIKULUM BERBASIS MADRASAH

Kecenderungan perubahan pembuatan keputusan kependidikan dari semula merupakan kewenangan pemerintah pusat menjadi kewenangan atau otonomi sekolah telah terjadi di negara Australia sekitar lebih dari dua dekade terakhir ini. Sementara di Indonesia, desentralisasi pendidikan atau otonomi daerah memberikan suasana baru dalam pengelolaan dan pengembangan kurikulum madrasah, terlebih lagi setelah diberlakukannya Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan (KTSP). Perubahan tersebut meliputi perpindahan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan atas pengembangan kurikulum dari yang bersifat terpusat oleh pemerintah menjadi kewenangan yang ada pada masing-masing sekolah/madrasah. Para guru dan seluruh komponen sekolah/madrasah menuntut lebih banyak kebebasan dalam menentukan kurikulum di sekolah/madrasah oleh warga madrasah. Tuntutan tersebut karena, model pengembangan kurikulum selama ini adalah *centre based or top down*, yaitu kebijakan pengembangan kurikulum yang sepenuhnya ditentukan oleh pusat, hanya sedikit sekali otonomi bagi setiap sekolah dalam proses pengembangan kurikulum

Aspek perpindahan tanggung jawab di dalam pengembangan kurikulum memberikan otonomi yang luas kepada sekolah/madrasah dan guru di dalam mengambil suatu keputusan atas kurikulum apa yang perlu dikembangkan khususnya pada tataran sekolah/madrasah. Keluasan madrasah dan guru di dalam mengambil keputusan berkaitan dengan pengembangan kurikulum sekolah/madrasah ini dikenal dengan sebutan Pengembangan Kurikulum Berbasis Sekolah/Madrasah (*SBCD*).

Beberapa karakteristik *SBCD* menurut Kemp (1977) adalah berupa suatu kontinum pengembangan kurikulum berbasis-sentral/pusat dengan model 'top-

down' hingga pengembangan kurikulum berbasis sekolah atau madrasah yang ditentukan oleh seluruh individu madrasah tersebut.

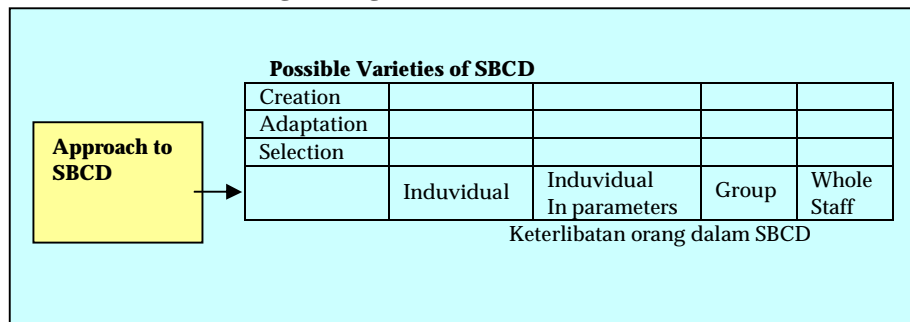
Dalam kenyataannya sulit menentukan apa yang khas atau unik dari SBCD dalam prakteknya, sebab meliputi suatu kontinum kegiatan yang berentang mulai dari seleksi individu hingga penentuan seluruh staf sekolah. Banyak yang menganggap bahwa keadaan SBCD semacam itu merupakan praktek yang mengada-ada (kosmetik), atau sebaliknya memandangnya sebagai prestasi dari praktek SBCD. *School Based Curriculum Development* atau pengembangan kurikulum berbasis sekolah/madrasah merupakan pengembangan suatu kurikulum atau salah satu aspek dari kurikulum oleh satu orang guru atau lebih di suatu sekolah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan oleh sekolah, yaitu suatu solusi untuk memecahkan permasalahan yang dialami dengan kurikulum yang ada. Laurie Brady (1990 : 3-17)

Pengertian Pengembangan Kurikulum Berbasis Sekolah/Madrasah

Pengembangan Kurikulum Berbasis Sekolah/Madrasah dapat didefinisikan sebagai upaya pengembangan kurikulum dengan menggunakan pendekatan *botton up or school based Curriculum* yang memberi peluang secara utuh kepada sekolah/madrasah untuk melakukan pengembangan kurikulum. Pendekatan tersebut merupakan lawan dari pendekatan *centre based or top down* yang sedikit sekali melibatkan sekolah/madrasah dalam pengambilan keputusan pengembangan kurikulum

Pendapat lain mengemukakan pengertian Pengembangan Kurikulum Berbasis Sekolah/Madrasah sebagai suatu proses yang dilakukan oleh beberapa atau keseluruhan anggota masyarakat sekolah/madrasah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian terhadap satu atau beberapa aspek kurikulum. Hal tersebut dilakukan dengan selektif dan atau adaptif dan atau kreatif.

Bagan I
Variasi Pengembangan Kurikulum Berbasis Madrasah



Berdasarkan bagan di atas, maka dipahami bahwa Pengembangan Kurikulum Berbasis Sekolah/Madrasah atau *School Based Curriculum Development* melibatkan beberapa hal yaitu:

- 1) Dalam proses pengembangan kurikulum, para guru dilibatkan dalam bentuk partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengembangan dan pelaksanaan kurikulum madrasah
- 2) Melibatkan seluruh komponen sekolah/madrasah yang meliputi kepala sekolah, guru, staff, masyarakat, siswa dan lain-lain
- 3) Pengembangan kurikulum bersifat selektif, adaptif dan kreatif. Ketiga sifat inilah yang membedakan konsep pengembangan kurikulum sebelumnya misalnya dengan konsep sebelumnya. Meskipun Beberapa penulis menganggap bahwa kegiatan seleksi, adaptasi dan kreasi yang dilakukan oleh seorang guru tidak termasuk dalam kategori Pengembangan Kurikulum Berbasis Sekolah/Madrasah seperti yang terlihat pada gambar di atas.
- 4) Adanya pergeseran tanggungjawab pengambilan keputusan kurikulum dengan tidak memutuskan garis hubungan sekolah dengan pusat.
- 5) Bersifat terus menerus dan dinamis yang secara ideal melibatkan guru, tenaga kependidikan lainnya, masyarakat, orang tua dan siswa.
- 6) Melibatkan kebutuhan dukungan struktur yang bervariasi
- 7) Adanya sebuah perubahan peran guru yang bersifat tradisional yang hanya bertugas sebagai pengajar menjadi peneliti dan pengembang kurikulum.

Pada dasarnya pengembangan kurikulum berbasis sekolah/madrasah bukanlah fenomena baru, tetapi sebetulnya sudah terjadi di beberapa sekolah, dan sangatlah sulit membuat batasan secara jelas atas pemahaman dari pengembangan kurikulum berbasis madrasah karena pengembangan kurikulum berbasis sekolah/madrasah mencakup pemilihan individual oleh seluruh staf. Oleh sebab itu, di dalam pengembangan kurikulum berbasis sekolah/madrasah, pada tahap pertama kita perlu melakukan analisis situasi sekolah dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut ini:

- 1) Struktur pendukung yaitu ketentuan administratif di dalam pengimplementasiannya baik di dalam maupun di luar sekolah
- 2) Struktur pengambilan keputusan yaitu ketentuan administratif di dalam sekolah untuk mengoptimalkan partisipasi staf
- 3) Pergerakan akuntabilitas yaitu dampak dari kurikulum untuk semakin meningkatkan akuntabilitas sekolah
- 4) Perubahan persepsi atas peran guru yaitu kemampuan para staf di dalam menyesuaikan peran barunya sebagai pengembang kurikulum daripada hanya sekedar pelaksana kurikulum

- 5) Sistem promosi yaitu melalui tranfer dan promosi
- 6) Seorang ahli sekolah yaitu yang memiliki pengalaman dan pengetahuan di dalam pengembangan kurikulum. Laurie Brady (1946 : 11-13)

Personil yang Terlibat

Secara history ada empat macam person yang berbeda yang terlibat dalam pengambilan keputusan kurikulum termasuk dalam hal ini Pengembangan Kurikulum Berbasis Sekolah/Madrasah sebagai berikut :

“Specialized personnel, Representative groups composed of specialized personnel and class room teacher, all profesional personnel dan all professional personnel plus representative lay citizens and student”.

1. *Specialized personnel* adalah 1) mereka yang berasal dari sekolah seperti guru dan supervisor. Biasanya mereka adalah ahli dan terlatih dalam bidang kurikulum. Keahlian mereka adalah karena keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan. 2) Ahli bidang studi atau mereka yang terlatih dalam penelitian organisasi kurikulum. mereka memiliki basic dari perguruan tinggi dan bekerja serta berkonsentrasi dalam pengembangan disiplin ilmu tunggal yaitu konsultan.

2. *Representative groups composed of specialized personnel and class room teacher* adalah gabungan dari guru kelas dan grup perwakilan dari para ahli.

3. *All profesional personnel* adalah seluruh guru kelas, supervisor, guru khusus dan administrator. Mereka inilah yang berpartisipasi dalam tiga system yaitu kurikulum, pembelajaran dan evaluasi. Asumsinya bahwa mereka yang mengambil keputusan rekayasa kurikulum adalah mereka juga yang mengembangkan, melaksanakan sekaligus mengevaluasi kurikulum.

4. *All professional personnel plus representative lay citizens and studenta* adalah mereka yang tersebut pada nomor tiga ditambah dengan warga masyarakat yang konsen terhadap sekolah. Walaupun ada yang mempertanyakan keterlibatan masyarakat dalam rekayasa kurikulum dengan alasan bahwa rekayasa kurikulum itu bersifat teknis. Para pendukung beranggapan perlunya partnership dalam dunia pendidikan, sehingga tugas dari para masyarakat adalah melakukan pertimbangan nilai. Beauchanb (1975 : 169-172)

Kelebihan dan Kekurangan Pengembangan Kurikulum Berbasis Madrasah

Beberapa keuntungan pengembangan kurikulum berbasis sekolah/madrasah yang dapat diidentifikasi adalah : 1) Guru-guru lokal dapat menentukan penggunaan sumber-sumber daya sekolah dengan baik. 2) Mereka

yang mengimplementasikan kurikulum adalah mereka yang telah mengembangkan kurikulum tersebut. Ini memberikan suatu pemahaman yang lebih besar terhadap identifikasi tugas-tugas belajar. 3) Kebutuhan siswa terpenuhi, hal ini akan memiliki suatu pengaruh kuat pada siswa. 4) Akuntabilitas yang besar terhadap kurikulum dan penampilan guru terlihat. 5) Para orang tua dan anggota masyarakat dapat secara mudah terlihat dalam perencanaan kurikulum yang bermakna. 6) Dianggap sebagai suatu kemampuan untuk melakukan respon terbaik terhadap kebutuhan situasi kelas, kesadaran terbaik di antara para staf dan terlihat adanya hubungan luas untuk memperbaiki kurikulum secara berkelanjutan

Sedangkan kelemahan Pengembangan Kurikulum Berbasis Sekolah/Madrasah dapat diidentifikasi sebagai berikut : 1) Kurangnya struktur-struktur pendukung untuk para administrator dan guru. 2) Sindrom konformitas para administrator dan guru mengurangi kreativitas. 3) Kurangnya waktu bagi guru untuk melaksanakan pengembangan kurikulum berbasis sekolah/madrasah. 4) Kurangnya guru yang berpengalaman atau terlatih dalam proses pengembangan kurikulum berbasis sekolah/madrasah. 5) Pergerakan guru antar sekolah untuk promosi layanan negara dan semacamnya menghasilkan suatu basis guru yang tidak stabil. 6) Memerlukan perubahan-perubahan signifikan pada peran guru dan administrator, yang secara alamiah menentang. 7) Sekolah-sekolah satu sama lain dengan cepat menjadi berbeda/tidak memiliki langkah yang sama dan tumpang tindih bisa muncul di antara sekolah-sekolah tersebut. 8) Para guru menganggap secara konsep SBCD merupakan model ideal, karena adanya latar belakang pengumpulan informasi, adanya perencanaan dan evaluasi, adanya kerjasama dengan orang lain, namun sangat kesulitan dan kontinuitas pelaksanaan 8) persoalan dana, persepsi prioritas kompetensi dan permasalahan kemampuan para staff. Murray Print : (1993 : 21-22)

D. PROSEDUR PENGEMBANGAN KURIKULUM BERBASIS MADRASAH

Pada dasarnya prosedur Pengembangan Kurikulum yang Berbasis Madrasah sama dengan prosedur Pengembangan Kurikulum Berbasis Sekolah (*School Based Curriculum Development*) mengingat term madrasah dengan sekolah memiliki substansi yang sama yaitu keduanya merupakan tempat belajar secara formal. Secara sederhana prosedur pengembangannya adalah sebagai berikut :

Pemilihan Model Pengembangan

Dalam Pengembangan Kurikulum Berbasis Madrasah, para pengembang kurikulum dapat memulai dengan memilih model konsep pengembangan yang

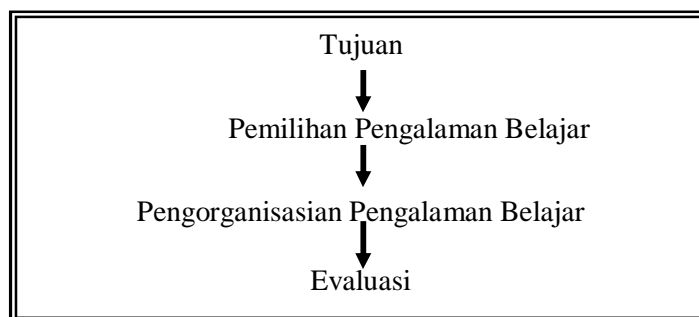
ditawarkan oleh para ahli kurikulum. Pemilihan model ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek lokalitas atau kebutuhan masyarakat di mana madrasah itu berada. Beberapa model pengembangan berikut ini dapat dipilih oleh para pengembang kurikulum madrasah dengan mempertimbangkan hubungan antara elemen kurikulum dan urutan penyusunannya sebagai berikut :

1) Model Rasional atau Tujuan

Model ini menekankan pada urutan elemen kurikulum, yang dimulai dengan tujuan, kemudian materi, metode dan diakhiri dengan evaluasi. Tujuan merupakan elemen yang sangat penting karena menjadi dasar penyusunan elemen berikutnya. Ada dua macam model rasional ini, yaitu model Tyler dan model Taba.

Pertama, Model Ralph Tyler. Menurut Tyler kurikulum harus disusun secara logis dan sistematis. Untuk menyusun kurikulum ada empat pertanyaan mendasar yang harus diajukan : 1). Apa tujuan pendidikan yang ingin dicapai?, 2). Apa pengalaman pendidikan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan? 3). Bagaimana mengorganisasikan pengalaman belajar secara efektif? Dan 4). Bagaimana menentukan apakah tujuan pendidikan telah tercapai?. Dari empat pertanyaan tersebut di atas, model pengembangan Tyler dapat dilihat dalam bagan berikut ini :

Bagan 2
Model Ralph Tyler



Kedua, Model Hilda Taba. Model ini merupakan modifikasi dari model Tyler menjadi model pengembangan kurikulum yang sesuai di sekolah/madrasah. Agar kurikulum bermanfaat bagi siswa, menurut Taba, kebutuhan-kebutuhan siswa harus didiagnosis terlebih dahulu. Pendekatan yang digunakan dalam pengembangan kurikulum bersifat induktif. Dan inilah yang membedakan model

Tyler dan model Taba. Ada tujuh langkah pengembangan kurikulum menurut Taba, 1) mendiagnosis kebutuhan, 2) merumuskan tujuan, 3) memilih isi, 4) mengorganisasi isi, 5) memilih pengalaman belajar; 6) mengorganisasi pengalaman belajar dan 7) menentukan alat evaluasi.

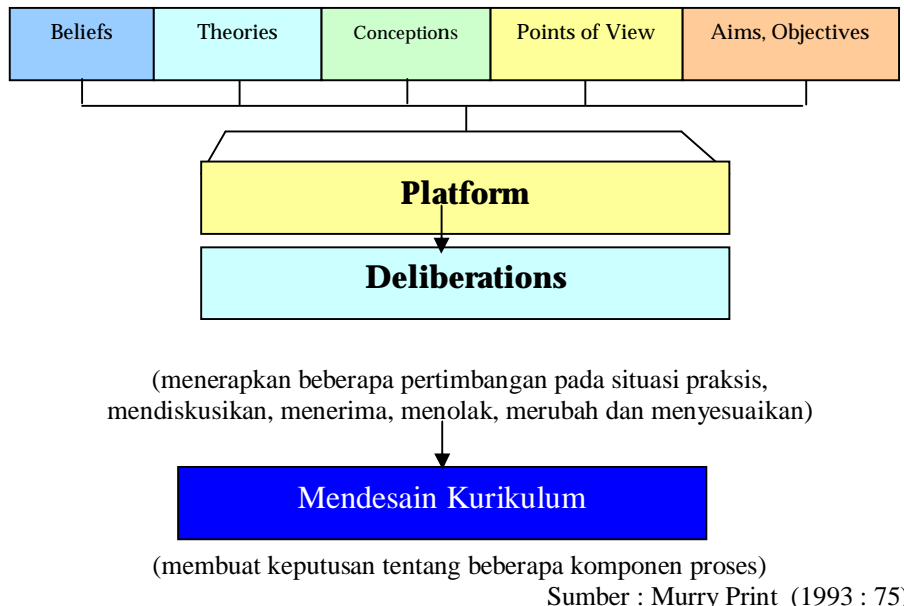
2) Model siklus

Model ini sangat banyak sekali. Salah satu contoh model ini adalah model D.K. Wheeler . **D.K. Wheeler** mengembangkan dan memperluas gagasan kurikulum yang diajukan Tyler khususnya Taba. Ia mengemukakan, ketika dikembangkan secara sistematis-logis, kelima tahap yang saling terkait dalam pengembangan kurikulum akan menghasilkan kurikulum yang efektif. Ia menggabungkan elemen-elemen pokok yang digagas oleh Tyler dan Taba. Lima tahap yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1) pemilihan tujuan (aims, goals dan objectives), 2) pemilihan pengalaman belajar, 3) pemilihan isi, 4) pengorganisasian dan pengintegrasian pengalaman belajar dengan isi, dan 5) evaluasi masing-masing tahap dan pencapaian tujuan. Sumbangan penting Wheeler pada pengembangan kurikulum adalah penekanan pada konsep dasar proses kurikulum siklus dan elemen kurikulum yang saling terkait. (Murray Print : 1993)

3) Model Dinamik atau Interaktif

Model dinamik ini berangkat dari pendekatan deskriptif terhadap kurikulum dimana para peneliti telah mengadakan observasi tingkah laku guru dan pengembang kurikulum karena pada dasarnya merekalah yang menyusun kurikulum. Dengan demikian, hal ini akan menjadi landasan penting bagi penyusunan teori. Konsekwensinya adalah pendekatan perspektif-analitis tidak begitu menonjol dalam model ini. Banyak penulis yang telah menuliskan model pengembangan kurikulum ini. Di antaranya adalah Decker Walker (1971) dan Malcolm Skilbeck (1976). Berikut ini contoh model yang dikembangkan oleh Decker Walker. Walker memulai dengan tiga tahapan dalam mempersiapkan penyusunan kurikulum. Ketiga tahap dimaksud dapat dilihat pada bagan 04 berikut ini;

Bagan 4
Model Proses Kurikulum Walker



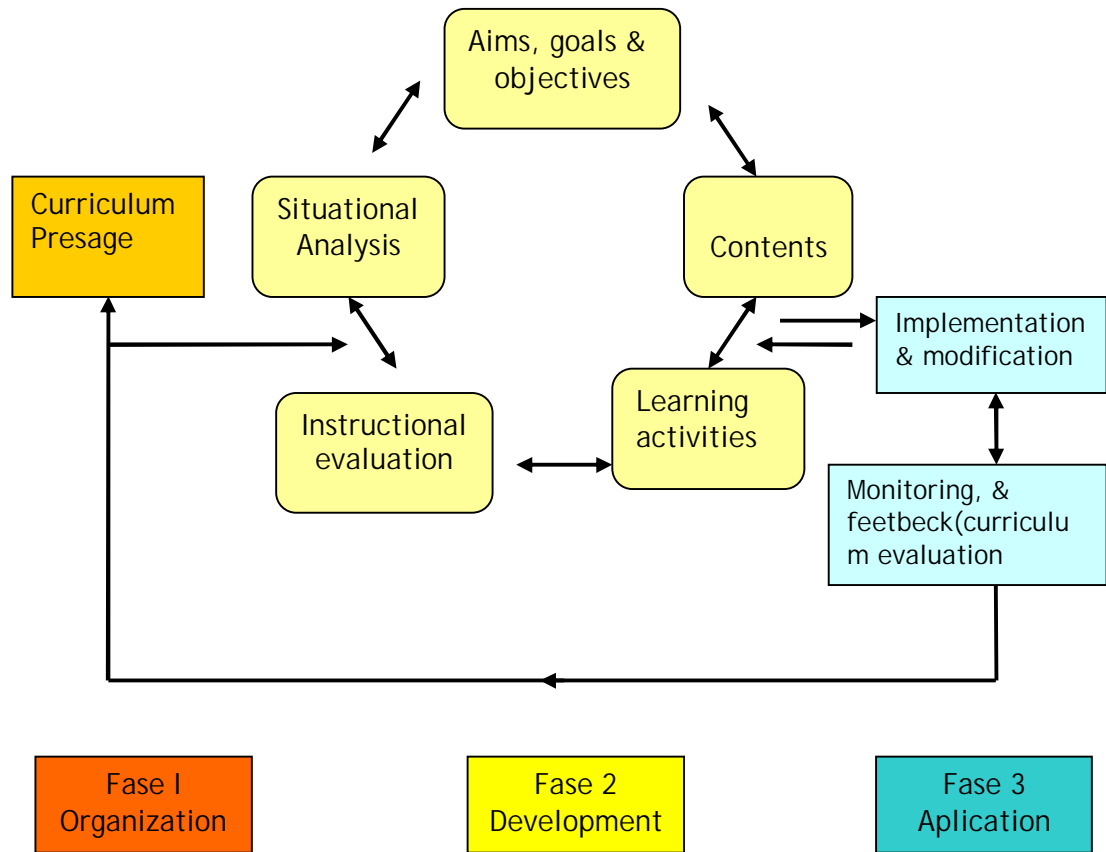
Bagan di atas menggambarkan tahapan pengembangan kurikulum dengan tiga tahap. Tahap pertama statemen platform diakui oleh para pengembang kurikulum. Statemen ini terdiri atas sejumlah gagasan, pandangan, pilihan, kepercayaan, dan nilai. Hal-hal tersebut akan mempengaruhi pembentukan dasar platform. Para pengembang kurikulum tidak boleh memulai tugasnya dengan tangan kosong. Semua hal di atas yang mereka bawa dalam proses pengembangan kurikulum dan berguna sebagai landasan atau platform. Kemudian, tahap kedua adalah tahap pertimbangan yang mendalam. Pada tahapan ini setiap pengembang kurikulum mempertahankan platformnya dan memusyawarakannya untuk mencapai kesepakatan. Tahap terakhir adalah mendesain kurikulum. Pada tahap ini, setelah mendiskusikan secara panjang lebar, mereka membuat keputusan beberapa komponen proses. Keputusan tersebut dicatat dan menjadi landasan dokumen kurikulum.

4) Model Eclectic Murry Print

Model pengembangan kurikulum eklektik ini dirancang untuk menawarkan pendekatan pengembangan kurikulum yang dapat dipahami secara mudah. Pendekatan ini diadopsi dari pendekatan sistematis-logis dan dinamik. Pendekatan sistematis-logis di sini karena dalam pengembangan kurikulum harus dilaksanakan dalam prosedur tahap demi tahap. Sedangkan pendekatan dinamik di sini karena menggambarkan situasi yang sedang terjadi ketika pengembang dan guru menyusun kurikulum. Situasi ini ditandai dengan kebingungan dan tidak menentu yang akhirnya membutuhkan penjelasan yang tidak mudah. Dengan mengadopsi dua pendekatan diharapkan kurikulum yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pengembang kurikulum terutama para guru. Model ini dikembangkan di Australia setelah diadakan penelitian bahwa guru-guru tidak mengetahui banyak tentang kurikulum, model dan teori. Ada tiga tahap yang harus diikuti dalam model pengembangan kurikulum ini, yaitu ; organisasi, pengembangan dan aplikasi.

Untuk lebih jelasnya model ini dapat dilihat pada bagan berikut ini; **1) Organisasi.** Terdapat tiga pertanyaan mendasar yang harus diajukan pada tahap ini yaitu a) siapa yang terlibat dalam pengembangan kurikulum, b) konsep kurikulum apa yang mereka bawa dan c) kekuatan-kekuatan apa yang mempengaruhi cara berpikir mereka. **2) Pengembangan.** Pada tahap ini semua orang yang terlibat dalam penyusunan kurikulum berkumpul untuk menyusun kurikulum yang dapat dilaksanakan. Untuk mencapai tahap ini pengembang mengikuti prosedur siklus yang dimulai dari analisis situasi, tujuan, isi, kegiatan belajar, dan evaluasi kemudian kembali ke analisis situasi lagi. **3) Aplikasi.** Pada tahap ini terdapat tiga kegiatan yang tergabung yaitu : 1) implementasi kurikulum, b) monitoring dan umpan baik pada kurikulum, dan c) penentuan data umpan balik pada kelompok presage.

Bagan 5
MODEL MURRAY PRINT



Sumber : Murry Print (1993 : 84)

1.

Analisis Situasi dan Kebutuhan

Analisis situasional merupakan komponen tahap awal dari implementasi pengembangan kurikulum. Tahap ini merupakan tahap pertimbangan, dimana sipengembang kurikulum akan memutuskan kebijakan kurikulum atas dasar penelitian, pengetahuan dan pemahaman situasi dimana kurikulum itu

dikembangkan. Salah satu factor yang harus dilakukan dalam pengembangan dan desain kurikulum adalah menganalisis situasional. Hilda Taba (1962) mempopulerkan dengan *'diagnosis of need'* (diagnosa kebutuhan). Analisis situasional adalah pengujian detail dari konteks dimana kurikulum itu dipakai dan pengaplikasian analisisnya kepada kurikulum yang akan dikembangkan. Penganalisisan ini dimaksudkan untuk mengefektifkan pengembangan kurikulum dengan cara analisis situasional yang sistematis.

Analisis situasi dibutuhkan oleh pengembangan kurikulum diberbagai tingkatan pendidikan baik untuk satu sekolah, kelompok sekolah, wilayah atau sistem pendidikan sekolah. seperti yang dilakukan di *School-Based Curriculum Development* (SBCD), tahap awal analisis dilakukan oleh guru terhadap lingkungan sekolahnya untuk mengembangkan kurikulum yang cocok atas kebutuhan siswa. Jika ingin kurikulum itu berguna, maka pertama kita harus mengetahui konteks dimana kurikulum itu dikembangkan.

Analisis situasional dapat didefinisikan sebagai proses pengujian konteks dimana kurikulum itu dikembangkan, serta pengaplikasian analisisnya pada kurikulum yang direncanakan. Ini adalah poin awal yang jelas untuk membangun suatu kurikulum, sekaligus sebagai kesempatan bagi pengembang untuk mencatat faktor lokal dalam mengembangkan kurikulum untuk mempertemukan kebutuhan siswa. Alasan untuk melakukan analisis situasi dapat disimpulkan: 1) mengidentifikasi kebutuhan lokal dari siswa, orang tua, guru dan masyarakat, 2) memahami konteks kurikulum lokal, 3) memfasilitasi perencanaan dan pengembangan berikutnya, dan 4) menyediakan data base sistematis untuk menemukan tujuan umum dan khusus kurikulum. Secara singkat ada tiga tahapan pelaksanaan analisis situasional yaitu;

Pertama, analisis kebutuhan. Hal ditujukan untuk memperoleh kesepakatan pimpinan di masa yang akan datang untuk sebuah kurikulum dengan menentukan ketidaksesuaian antara situasi berlangsung dan yang diinginkan. Analisis kebutuhan juga dapat digunakan oleh pengembang kurikulum untuk menentukan dan memprioritaskan kebutuhan pendidikan. Secara ekstrim, ini berguna dalam memfasilitasi analisis situasi dan meletakkan dasar untuk seperangkat tujuan kurikulum.

Kedua, melakukan pengujian sebuah kebutuhan dengan lima fase pendekatan. Kelima fase tersebut adalah; 1) merumuskan pernyataan tujuan dengan melibatkan seluruh guru, masyarakat, orang tua dan mungkin siswa. 2) menilai pernyataan-pernyataan tujuan dengan menggunakan skala (katakanlah 1 sampai 5) oleh para individu dan kemudian dirata-ratakan dengan kelompok. 3) mengurutkan pernyataan-pernyataan tujuan menentukan pernyataan-pernyataan tujuan 4) memeriksa masing-masing pernyataan, baik subyektif (melalui penilaian

guru) maupun obyektif (tes, pengujian, dll), dalam bentuk apa yang terjadi di dalam institusi tersebut, suatu kesenjangan dapat ditentukan dengan menggambarkan perbedaan antara realitas dan keadaan yang dipilih siswa. 5) mengembangkan rencana-rencana tindakan Dengan menggunakan ketidaksesuaian sebagai suatu basis untuk perubahan, para pengembang kurikulum kemudian mulai menciptakan atau menyesuaikan kurikulum yang akan memecahkan permasalahan-permasalahan yang dirasakan.

Ketiga, pelaksanaan analisis situasional dengan melibatkan empat langkah; 1) mengidentifikasi permasalahan dalam konteksnya, 2) memilih faktor-faktor yang tepat, 3) pengumpulan dan analisis data dan 4) membuat rekomendasi.

Terdapat dua jenis faktor analisis situasional, yaitu : 1) faktor eksternal sekolah yang meliputi perubahan dan harapan kultural dan sosial, prasyarat dan tantangan sistem pendidikan, perubahan hakekat muatan, sistem dukungan guru, sumber daya, 2) faktor internal sekolah yang terdiri atas siswa, guru, etos sekolah, sumber daya materi, permasalahan yang dirasakan. Setelah melaksanakan pengumpulan dan analisis data dalam suatu analisis situasional, para pengembang kurikulum membuat rekomendasi-rekomendasi untuk arah dan struktur kurikulum yang diajukan. Murry Print (1993 : 109 -111)

Penentuan *Aims, Goals, dan Objectives*

Berikut penjelasan tentang *Aims, Goals, dan Objectives* secara sederhana : Istilah *aims* digunakan sebagai tujuan pendidikan yang merupakan harapan dan keinginan dari suatu masyarakat, atau apa yang diharapkan atau ingin dicapai oleh kurikulum secara luas. Atau dengan kata lain, *aims* merupakan tujuan suatu pendidikan secara umum dan menunjukkan jangka waktu yang relatif panjang dan berlaku untuk beberapa tahun. Sementara, Istilah *goals* digunakan untuk tujuan yang lebih spesifik dibandingkan dengan *aims*. Secara jelasnya *goals* merupakan tujuan kurikulum yang dijabarkan dari *aims*. Biasanya diungkapkan dalam bahasa yang tidak bersifat teknis, juga diarahkan pada pencapaian prestasi siswa dengan meningkatkan isi dan *skill*. Cara lain untuk mengkonseptualisasikan *goals* adalah dengan mempertimbangkannya sebagai cara dari suatu institusi dan organisasi beserta masyarakat dalam membantu pencapaian tujuan pendidikan.

Oleh karena itu, jika umpamanya tujuan (*aims*) sistem pendidikan itu adalah membuat siswa bisa membaca dan berhitung, maka tujuan (*goals*)-nya adalah cara suatu institusi pendidikan secara umum dalam mencapai tujuan (*aims*) tersebut. *Goals* merupakan tujuan yang bersifat jangka menengah. Selanjutnya *Objectives* merupakan rumusan tujuan kurikulum yang paling spesifik, yakni apa yang seharusnya siswa pelajari melalui interaksi dengan suatu kurikulum.

Objectives menekankan pada perubahan tingkah laku siswa. Objectives merupakan penjabaran dari *aims* dan *goals*, dan dinyatakan secara jelas, menggunakan bahasa teknis dan istilah-istilah perilaku.

Tabel 1
Hubungan antara *Aims*, *Goals*, dan *Objectives*

KRITERIA	AIMS	GOALS	OBJECTIVES
DEFINISI	Secara umum dinyatakan tentang apa yang harus dicapai oleh suatu kurikulum	Tujuan kurikulum yang dinyatakan secara lebih jelas dan merupakan penjabaran dari aims	Pernyataan yang lebih spesifik tentang tujuan suatu program dan merupakan penjabaran dari goals
EKSPRESI	Dinyatakan secara luas, menggunakan bahasa yang tidak bersifat teknis	Secara umum dinyatakan dengan bahasa yang tidak bersifat teknis.	Bahasa yang bersifat teknis, kata kunci yang tegas, dapat menggunakan istilah perilaku
WAKTU	Tujuan jangka panjang, biasanya untuk beberapa tahun	Tergantung pada bagaimana tujuan jangka (<i>aims</i>) tersebut dijabarkan ke dalam <i>goals</i> .	Jangka pendek, mencakup tujuan suatu pengajaran, satu hari, satu minggu, satu smt.
DINYATAKAN OLEH	Dinyatakan oleh masyarakat melalui bentuk-bentuk seperti politisi, sistem pendidikan, kelompok penekan.	Otoritas pendidikan dalam suatu sistem, level daerah, perumus silabus, dokumen kebijakan sekolah.	Guru kelas secara individual, kelompok guru

Sumber : Murry Print (1993 : 118)

Sementara ciri-ciri Tujuan (objectives) yang Efektif adalah : 1) **Comprehensiveness**. Tujuan kurikulum ini mesti dirumuskan dengan mempertimbangkan berbagai masukan di antaranya adalah dari berbagai kalangan profesi, dan mesti mempertimbangkan perkembangan-perkembangan zaman serta perkembangan-perkembangan politik ekonomi yang terjadi. Komprehensif berarti tujuan kurikulum dirumuskan mesti mencakup ketiga ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. 2) **Consistency**. Tujuan kurikulum itu harus terlihat hubungan secara efektif dan konsisten dengan unsur-unsur lainnya. Salah satu sumber kekacauan atau ketidakjelasan tujuan adalah ketika tujuan khusus ini dirumuskan tanpa

merujuk kepada tujuan umum (*aims, goals*). **3) Attainability.** Tujuan kurikulum dirumuskan mesti memungkinkan dapat dicapai oleh siswa. **4) Suitability** “kesesuaian dengan kebutuhan siswa dan siapa yang berhak menentukan kesesuaian tersebut”. Para pengembang kurikulum sepakat, bahwa tujuan kurikulum mesti disusun sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan siswa. **5) Validity.** Tujuan harus merefleksikan realitas apa yang mereka maksud, atau tujuan mesti menggambarkan apa yang mereka ingin capai. **6) Specificity.** Tujuan pendidikan tersebut harus dirumuskan secara tepat, jelas dan spesifik. Tujuan yang tidak jelas dan tidak spesifik akan sulit dipahami baik oleh murid maupun oleh guru. Khususnya oleh guru, akan sulit untuk dapat mengimplementasikan dan merealisasikannya. Maka untuk itu, tujuan ini mesti disusun dalam bentuk rumusan perilaku yang jelas dan spesifik.

Merumuskan Isi Kurikulum

Isi Kurikulum adalah bahan ajar dalam proses belajar mengajar yang meliputi pengetahuan, ketrampilan dan nilai(values) yang terkait dengan bahan ajar yang disampaikan tersebut. Agar menjadi guru yang efektif, penulis menyebutkan isi kurikulum sebagai berikut: 1) Pengetahuan yang berisi fakta, prinsip, dan generalisasi yang ada dalam bahan ajar. 2) Pengetahuan pendidikan meliputi metode yang digunakan guru dalam mengajar agar siswanya benar-benar memahami materi ajar. 3) Pengetahuan Kurikulum, yakni pemahaman terhadap konteks kurikulum untuk mengajarkan pengetahuan tentang materi ajar.

Kriteria Pemilihan Isi Kurikulum. Penulis mengemukakan 6 kriteria pemilihan isi kurikulum, yaitu 1) Signifikan; dengan pengetahuan dan disiplin ilmu, keseimbangan antara konsep, ide dan fakta. 2) Validitas; konten harus otentik, benar dan akurat. 3) Relevansi sosial; berhubungan dengan nilai moral, ideal, masalah sosial, isu-isu kontroversi. 4) Utility (berguna); menyiapkan siswa agar hidup lebih “dewasa”. 5) Learnability (dapat dipelajari); dapat digunakan siswa dengan latar belakang dan kemampuan yang berbeda. **6) Interest;** didasarkan pada minat (interest) anak didik

Sementara ruang lingkup isi kurikulum mengacu pada keluasan dan kedalaman kurikulum pada satu kurun waktu. Dalam menentukan ruang lingkup isi kurikulum, penulis menyarankan beberapa konsep yaitu *Time Constraint* (hambatan waktu), *A common core* (Konsep inti), *Special needs of Content* (kebutuhan khusus dari Isi), *Integration of Content* (keterpaduan isi) dan *A total amount of content required* (jumlah isi yang dibutuhkan)

Penyusunan materi juga harus mempertimbangkan keruntutan (*sequence*). Keruntutan adalah susunan dari isi kurikulum yang disampaikan pada peserta didik. Ada enam kriteria untuk mengurutkan isi kurikulum sebagaimana yang disarankan oleh Robert Zais, yaitu: dari yang sederhana menuju yang ruwet/sulit (*simple to complex*), pelajaran bersyarat (*prerequisite learnings*), kronologis (*chronology*), dari keseluruhan ke bagian-bagian (*whole-to-part learning*), dari konkrit ke yang abstrak (*increasing abstraction*) dan pengurutan secara Spiral (*Spiral Sequencing*)

Seleksi Metode-Metode Kurikulum

Pemilihan metode mungkin membutuhkan perlakuan yang lebih dibandingkan dengan komponen kurikulum lainnya. Dampak dari metode sangatlah penting, dan pada bagian ini akan dipaparkan pentingnya pemilihan metode sebagai bagian utama dari komponen kurikulum. Metode adalah bagaimana seorang guru di dalam mengaktifkan isi dari kurikulum, karena isi kurikulum akan berarti bagi siswa apabila guru dapat mentranmisikannya dengan berbagai cara. Tidak ada satupun suatu metode yang paling baik, sama halnya bahwa semua komponen kurikulum pada dasarnya adalah sama pentingnya.

Untuk meningkatkan efisiensi belajar siswa, maka guru harus dapat memilih metode yang paling pas dari sekian metode yang ada. Beberapa kriteria di dalam memilih metode dan terlepas dari rumusan objectives adalah: 1) Prinsip-prinsip belajar. 2) Identifikasi kegiatan belajar yang dilakukan.

Selain kedua kriteria tersebut di atas, masih terdapat kriteria lainnya, yaitu: 1) *Variety*: metode harus bervariasi untuk mencapai tujuan dan dapat mengakomodasikan perbedaan tingkat dan gaya belajar siswa. 2) *Scope* yaitu metode harus cukup bervariasi di dalam mencapai seluruh tujuan yang sudah dirumuskan. 3) *Validity* yaitu metode khusus harus berhubungan dengan bagian-bagian rumusan tujuan. 4) *Appropriateness* yaitu metode harus berhubungan dengan minat, kemampuan dan keterbacaan siswa. 5) *Relevance* yaitu metode yang digunakan harus berhubungan dengan apa yang dibutuhkan setelah siswa tamat belajar.

Penelitian berkaitan dengan metode menunjukkan dan memberikan saran bahwa sebaiknya keterlibatan siswa di dalam perencanaan kurikulum harus semakin ditingkatkan, oleh sebabnya pertimbangan keterlibatan siswa di dalam pemilihan metode kedepan harus semakin dipertimbangkan di dalam upaya pemilihan isi kurikulum dan pencapaian tujuan.

Terminologi metode pada prinsipnya juga mencakup hal-hal berikut 1) *Integration*: paduan mata pelajaran ke dalam wilayah yang lebih besar sehingga siswa dapat memahami keterkaitan antar setiap mata pelajaran. 2) *Sequence* yaitu urutan mata pelajaran dan pengalaman belajar ke dalam tahapan belajar yang dapat dikelola untuk pengembangan konsep. Dan 3) *arrangement* yaitu organisasi mata pelajaran yang membuat logis dan semakin mudah dipelajari. Laurie Brady (1946 : 111-126)

Pada dasarnya tidak ada suatu metode tunggal yang lebih baik atau lebih buruk jika dibandingkan dengan metode-metode lainnya. Setiap metode memiliki kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan tersendiri. Seleksi metode penting untuk meningkatkan efisiensi belajar siswa, kriteria penyeleksiannya antara lain dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip dan identifikasi kegiatan belajar yang lebih, prinsip variasi, ruang lingkup, validitas, relevansi, dan kesesuaian metode.

Evaluasi Kurikulum

Meskipun evaluasi kurikulum adalah bagian dari totalitas system penilaian sekolah, pelaksanaan evaluasi kurikulum secara fungsional semestinya bagian dari system kurikulum dan subject untuk rekayasa kurikulum. Ada empat dimensi dari evaluasi kurikulum yaitu 1) *Evaluasi guru dalam menggunakan kurikulum*. Evaluasi guru dalam penggunaan kurikulum secara logis adalah hal pertama untuk dilakukan. Hal tersebut dilakukan dengan cara pengamatan data-data penggunaan guru terhadap kurikulum. Ketika guru tidak menggunakan kurikulum dalam pengembangan strategi pembelajarannya, maka evaluasi pun dihentikan. 2) *Evaluasi desain kurikulum*. Evaluasi desain adalah evaluasi yang paling sulit dilakukan karena katiadaan kreteria dalam pelaksanaannya. Desain yang berbeda tentu tidak dapat dibandingkan dan disesuaikan dengan kreteria yang umum. Untuk memastikan kesuksesan seorang guru dalam menggunakan kurikulum, maka kecukupan desain perlu diperhatikan. Cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan melihat aspek aspek umum dari sebuah Desain. Akan tetapi hal inipun belum terformulasi. Meskipun kita tidak belajar banyak tentang bagaimana membandingkan desain kurikulum A dengan desain kurikulum B dengan sebuah pengawasan yang cukup, akan tetapi kita dapat mengevaluasi individual yang merupakan bagian dari desain kurikulum. Salah satu contoh misalnya ” *goal* dan *objectives*. Ketika sejumlah tujuan umum dan khusus dinyatakan dalam sebuah kurikulum, tujuan-tujuan yang prioritas kiranya lebih dahulu dievaluasi. Teknik Delphi atau beberapa teknik lainnya dapat membantu tugas ini. Jika sebuah kurikulum mencakup sebuah tujuan tingkah laku yang khusus, maka kejelasannya merupakan hal penting untuk dievaluasi. 3) *Evaluasi Lulusan*. Evaluasi berikutnya adalah penilaian kurikulum sebagai instrument untuk

memprediksi lulusan. Hal ini juga sangat sulit untuk dilakukan. Alasannya karena beberapa variabel sistem pembelajaran awal sekolah telah terjadi percampuran antara waktu perencanaan kurikulum dengan ketaatan pembelajaran siswa. Pada tingkat penilaian pembelajaran siswa, kita dapat membedakan antara pembelajaran yang diinginkan dengan pembelajaran yang diperoleh di luar bidang kurikulum dan pembelajaran. Jika kurikulum adalah rencana dasar dengan tujuan yang diinginkan dan isi budaya yang diseleksi yang diharapkan untuk menghasilkan tujuan itu dan jika perencanaan pembelajaran telah diperluas ke dalam tujuan yang lebih khusus, maka tujuan itu yang menjadi dasar penilain usaha sengaja dari sekolah. 4) *Evaluasi system kurikulum*. Setiap aspek kurikulum harus di bawah pengawasan evaluasi. Buruknya sebuah sistem karena kurang vital. Umpan balik dari sistem evaluasi itu seharusnya tersedia untuk memudahkan perbaikan sistem. Pemilihan arena, pemilihan orang yang terlibat, pengorganisasian orang-orang untuk bekerja, prosedur kerja, tugas-tugas yang diperankan oleh kepemimpinan personal adalah keseluruhan subjek yang harus dievaluasi baik kelebihan maupun kekurangannya. Hal inilah yang membuat sistem kurikulum bekerja. Umpan balik dari evaluasi itu dapat membantu untuk memperbaiki sistem dan menyediakan keberlanjutan dan perkembangan sistem kurikulum dari tahun ke tahun. Beauchamb (1975 : 169-172)

Adapun kreteria pelaksanaan evaluasi kurikulum yang baik adalah sebagai berikut: 1) *Continuity* yaitu evaluasi harus dilakukan berkesinambungan dan merupakan bagian terpadu di setiap bagian pembelajaran dan pengajaran. 2) *Scope*: prosedur evaluasi harus bervariasi sebagai cakupan dari tujuan. 3) *Compatibility*: evaluasi harus kompatibel dengan rumusan tujuan. 4) *Validity*: prosedur evaluasi harus mengukur apa yang seharusnya diukur. Test juga harus reliabel, misalnya konsisten di dalam pengukurannya. 5) *Objectivity*: evaluasi harus didasarkan pada objektivitas, dan hindari yang mengarah pada subjektivitas dan 6) *Diagnostic value*: evaluasi harus mengenal tingkatan performa siswa dan proses yang diperlukan untuk mencapai performa tersebut. 7) *Participation* yaitu prosedur evaluasi dimungkinkan untuk ditingkatkan oleh para siswa itu sendiri. Laurie Brady (1946 : 132-136)

Sementara model evaluasi yang digunakan, para pengembang kurikulum dapat memilih berbagai model evaluasi yang datawarkan secara konsep oleh para ahli evaluasi kurikulum.

Implementasi Kurikulum

Implementasi berarti menempatkan kurikulum untuk direalisasikan. Ada dua pertimbangan untuk sebuah kurikulum yaitu sebagai bagian dari pengajaran dan sebagai sebuah sistem untuk memprediksi hasil pembelajaran. Dalam

pelaksanaannya, implementasi kurikulum terdiri dari berbagai proses untuk menyelesaikan dua tujuan tersebut.

Tugas pertama dari implementasi kurikulum adalah mengatur lingkungan sekolah sehingga sebuah kurikulum dapat digunakan oleh guru sebagai bagian penting dari pengajarannya. Implementasi berada pada wilayah gabungan sistem kurikulum dengan sistem pembelajaran. Dalam hal ini, kurikulum menjadi alat kerja bagi guru. Peran perencana kurikulum itu dikomunikasikan dan ditafsirkan oleh guru untuk sekelompok siswa. Syarat utama dalam implementasi kurikulum adalah komitmen para guru untuk menggunakan kurikulum sebagai bagian dari pengembangan strategi pembelajaran. Untuk meningkatkan komitmen guru tersebut maka perlu adanya panduan dan melibatkan mereka dalam perencanaan serta administrasi kepemimpinan

Umpan Balik dari Perubahan Kurikulum

Dalam pelaksanaan sebuah kurikulum, tentu saja tidak terlepas dari berbagai kekurangan. Oleh karena itu, diperlukan adanya umpan balik atau perubahan-perubahan dalam proses pelaksanaannya. Perubahan kurikulum tetap mencerminkan perubahan di dalam masyarakat dan pendidikan secara umum. Karenanya kebanyakan yang berhubungan dengan perubahan kurikulum di dalam sekolah tersebut menunjuk pada cara menerapkan perubahan terefektif. Suatu inovasi kurikulum akan mengubah masyarakat ke arah tertentu, tetapi pada dasarnya perubahan kurikulum mencerminkan perubahan masyarakat.

Dalam perubahan kurikulum terdapat beberapa konsep antara lain: 1) *Inovasi* merupakan suatu obyek, gagasan atau praktek yang bersifat baru dan dengan proses yang baru. Dimana gagasan atau praktek dapat diadopsi. 2) *Difusi* adalah suatu proses yang terkait dengan penyebaran suatu gagasan yang baru dari orang yang mengadopsinya. 3) *Dissemination* yaitu suatu proses yang sengaja untuk menyebar suatu idea yang baru yang berasal dari orang yang mengadopsi. 4) *Change agents* yaitu individu dan kelompok yang terlibat dalam proses perubahan melalui jalur komunikasi antara innovator dan link. 5) *Adoption* mengacu pada penerimaan awal dari suatu inovasi dan tingkat penerimaannya dalam suatu system.

Sementara Sumber Perubahan Kurikulum ada empat prinsip pokok dalam sebagai berikut: 1) Kurikulum berubah di sekolah-sekolah mencerminkan perubahan-perubahan di dalam masyarakat. 2) Bahwa kurikulum sekolah tersebut bereaksi terhadap perubahan di dalam masyarakat secara cepat dan sengaja. 3) Perubahan-perubahan terjadi dikarenakan adanya benturan secara implisit yang ada didalam praktek dengan kebijakan kurikulum. 4) Bahwa perubahan-perubahan

mungkin dibuat atau dicari di dalam kebijakan kurikulum dan praktek untuk mempromosikan tujuan tertentu atau mencapai sasaran tertentu di dalam sistem.

Adapun Proses perubahan kurikulum sekolah pada umumnya dengan beberapa pertimbangan, antara lain: danya perubahan kurikulum akibat dari inisiatif sekolah karena kebutuhan dari para siswa yang berbeda.

Berdasarkan riset para ahli kurikulum bahwa terdapat empat tahap-tahap dasar proses perubahan kurikulum (Fullan, 1982, 1987; Miles,1987; Smith & Lovat,1991; Print, 1988), Yaitu: **1) Kebutuhan** (*need*). Diawal proses perubahan kurikulum dikarenakan adanya perhatian, ketidakpuasan atau kebutuhan dengan kurikulum yang sudah berjalan. Kebutuhan dapat bersumber dari para guru, para siswa, orang tua, pengurus-pengurus, sistem bidang pendidikan atau didasarkan pada gabungan beberapa sumber pertimbangan di atas. **2) Adopsi**. Adopsi berarti penerimaan yang sengaja terhadap suatu inovasi, sebagai bentuk pernyataan dalam memutuskan akan satu kebutuhan. Faktor-faktor penting di dalam keberhasilan suatu adopsi antara lain: bahwa adanya akses dengan pengambil kebijakan/keputusan; adanya beberapa bentuk alternatif dari inovasi; adanya dukungan administratif dari pusat untuk inovasi, inovasi tersebut merupakan kebutuhan bersama dan memiliki kualitas yang baik, ketersediaan pembiayaan dalam mendukung implementasi, peran dan efektivitas penuh dari agen-agen perubahan masyarakat yang stabil. **3) Implementasi**. Implementasi merupakan suatu rangkaian dari adopsi terhadap suatu inovasi sampai kepada proses penerimaan atau pelembagaan yang lengkap. **4) Pelembagaan/berkesinambungan** yaitu suatu inovasi harus dilaksanakan secara terus menerus/kontinyu dari waktu ke waktu dalam proses berintegrasi dalam satu struktur organisasi. Disadari pada tahap ini memerlukan banyak waktu dan perubahan tidak dapat diberikan suatu jaminan bahwa inovasi sukses sampai pada pelembagaan. Murry Print (1993 : 221).

E. KETERLIBATAN ORANG TUA DAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KURIKULUM

Dalam rangka menjadi lembaga pendidikan Islam unggulan, maka madrasah dalam melakukan seluruh kegiatannya tetap memberdayakan dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat. “Madrasah yang lahir dari dan untuk masyarakat harus tetap mempersiapkan kebutuhan yang nyata dari masyarakat sebagai pemilik lembaga pendidikan tersebut. Kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah kebutuhan masyarakat lokal, nasional, regional dan global.” Keterbatasan partisipasi masyarakat akan berakibat pada kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap madrasah. Bentuk-bentuk kepercayaan yang dimaksud dapat berupa partisipasi masyarakat dalam memobilisasi sumber-sumber dana yang tersedia pada orang tua dan masyarakat, sementara dukungan pemerintah terhadap lembaga

pendidikan berkurang, apalagi madrasah yang pengelolaannya berada di bawah Departemen Agama, bukan di bawah Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Salah satu bentuk keterlibatan orang tua atau masyarakat adalah keterlibatan mereka dalam pengembangan kurikulum. Dalam sebuah buku yang ditulis oleh Ramsay dkk dengan judul "*Development Patnership :Collaboration between teachers and parents*" bahwa terdapat enam tahapan sistematis yang dapat dilakukan oleh pengembang kurikulum dalam upaya melibatkan orang tua atau masyarakat dalam mengembangkan kurikulum sekolah dalam hal ini termasuk madrasah. Tahapan-tahapan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Pertama, pra pengembangan atau persiapan kerja. Dalam tahapan awal ini, pengembang kurikulum mengidentifikasi tingkat keterlibatan orang tua dalam sekolah. Dalam pelaksanaanya, para guru sesungguhnya dapat bertindak sebagai peneliti (*research*) dalam rangka pengembangan kurikulum.

Kedua, mulai bekerja. Pengembang kurikulum melakukan pertemuan dengan pihak sekolah berupa kepala sekolah, para staff, para orang tua. Dari pertemuan ini, pengembang kurikulum memperoleh ide atau informasi yang akan dijadikan dasar dalam merencanakan pengembangan kurikulum selanjutnya.

Ketiga, membangun Lingkaran Kerja. Pada tahapan ini, pihak sekolah membentuk sebuah struktur atau mengangkat pengurus Komite Review Kurikulum (*Curriculum Review Commite*). Komite ini bertujuan sebagai pengendali atau pengarah atau kepemimpinan group. Sekalipun melibatkan orang tua dan masyarakat dalam tahapan ini, para guru tetap menjadi kunci utama yang harus menjaga atau menjamin pelaksanaan kurikulum di kelas serta menjadi kunci dalam teknik berinteraksi dengan para orang tua. Berkaitan dengan ini, diharapkan setiap sekolah memiliki rincian pribadi siswa, latar belakang keluarga, pengalaman pendidikan dan karakteristik pembelajaran dan perilaku siswa. Untuk mengetahui hal ini, beberapa sekolah mengirimkan angket untuk orang tua atau dengan mewawancarai siswa sendiri.

Keempat, melakukan Pertemuan Rutin dengan para orang tua/masyarakat. Minimal ada tiga kategori pendekatan yang dapat dilakukan untuk melibatkan orang tua yaitu 1) Aktifitas sosial yang membuka kesempatan bagi orang tua untuk berpartisipasi dalam aktifitas pendidikan seperti jamuan makan malam multikultural, hari olah raga sekolah dan lain-lain. 2) Kegiatan yang terpusat pada anak dengan menfokuskan diri pada penggambaran perhatian orang tua atau keterlibatan mereka dalam beberapa pembelajaran khusus bagi anak atau pertimbangan perilaku. 3) Kegiatan yang terpusat pada isu tertentu.

Kelima, Melakukan pertimbangan, pengelompokan dan perencanaan ulang dalam bentuk evaluasi bersama. *Dan keenam*, Pengembangan piagam kerja sama Rachel Bolstad, (2004 : nzcer.org.nz)

Koentjaraningrat (1982) membagi dua partisipasi masyarakat dalam pengembangan kurikulum yaitu partisipasi kuantitatif dan partisipasi kualitatif. Partisipasi kuantitatif menunjuk pada frekuensi keikutsertaan orang tua dan masyarakat terhadap pengembangan dan pelaksanaan kurikulum. Sementara partisipasi kualitatif menunjuk pada tingkat dan derajatnya. Oleh karena itu, sekolah seharusnya menjadi patner orang tua dan masyarakat.

Beberapa pendekatan yang dapat digunakan oleh Madrasah untuk menggalang partisipasi orang tua dan masyarakat adalah **1)** melibatkan masyarakat dalam berbagai program dan kegiatan sekolah yang bersifat sosial kemasyarakatan seperti bakti sosial, pentas seni dan lain-lain. **2)** mengidentifikasi tokoh masyarakat (orang tua, tokoh agama, olahragawan, seniman dan lain-lain) yang memiliki pengaruh terhadap masyarakat. **3)** Melibatkan orang tua dan masyarakat dalam berbagai program, seperti melibatkan kepolisian dalam kegiatan baris berbaris. **4)** memilih waktu yang tepat untuk melibatkan orang tua dan masyarakat sesuai dengan kondisi dan situasi yang berkembang

Sementara itu, Depdiknas (2000) menyebutkan beberapa hal yang perlu dilakukan sekolah untuk melibatkan orang tua dan masyarakat dalam pengembangan dan implementasi kurikulum adalah melaksanakan program-program kemasyarakatan, mengadakan *open house* yang memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui program sekolah, Mengadakan bulletin sekolah dan membuat program kerja sama dengan masyarakat. Memperhatikan pandangan di atas, tampaknya keterlibatan orang tua dan masyarakat, hanya terfokus pada pelaksanaan kurikulum madrasah. Hal ini berarti orang tua dan masyarakat belum dilibatkan secara maksimal dalam mendesain dan mengembangkan kurikulum seperti yang diinginkan konsep Pengembangan Kurikulum Berbasis Madrasah.

F. PENGEMBANGAN CIRI KHAS MADRASAH (sebuah alternatif)

Madrasah sebagai lembaga yang lahir dari dan untuk masyarakat, seharusnya senantiasa berusaha keras untuk mengembangkan kurikulumnya dengan berpihak pada kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, madrasah harus melibatkan seluruh potensi yang dimiliki dengan menerapkan konsep pengembangan kurikulum berbasis madrasah di atas. Diharapkan dengan konsep ini, madrasah memiliki ciri khas sebagai lembaga pendidikan yang berbeda dengan lembaga pendidikan umum lainnya.

Pengembangan Ciri Khas Madrasah bidang Keagamaan

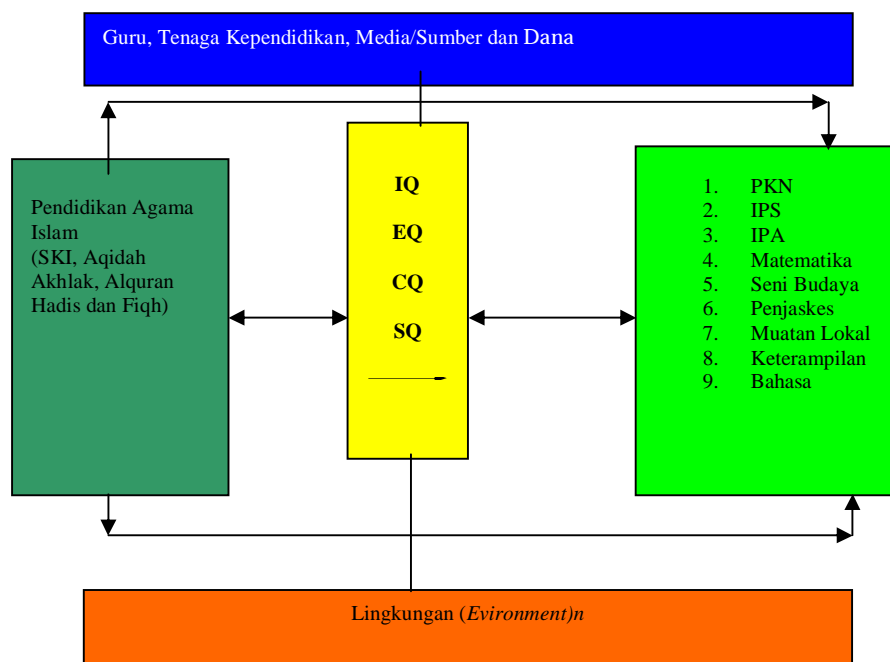
Dalam pasal 55 Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa masyarakat diberikan kesempatan untuk menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial dan budaya untuk kepentingan masyarakat. Dalam hubungan ini, setiap satuan pendidikan termasuk madrasah mempunyai kedudukan yang sama dalam sistem pelaksanaan kurikulum, evaluasi pendidikan dan standar nasional pendidikan.

Berdasarkan hal di atas, maka perguruan Islam, khususnya madrasah juga memiliki tujuan untuk menghasilkan pendidikan yang khas yaitu manusia muslim yang menghayati dan mengamalkan agamanya dengan menjadikan semua mata pelajaran sebagai wahana untuk meningkatkan keberhasilan pendidikan agama. Mata pelajaran yang dimaksud adalah Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Seni dan Budaya, Penjaskes, Muatan Lokal dan lain-lain. Semua mata pelajaran ini diberikan nuansa keagamaan atau pelaksanaannya dijiwai oleh pendidikan agama.

Menurut Muhaimin, bahwa kurikulum madrasah perlu dikembangkan secara terpadu dengan menjadikan ajaran dan nilai Islam sebagai petunjuk dan sumber konsultasi bagi pengembangan berbagai mata pelajaran umum, yang operasionalnya dapat dikembangkan dengan cara mengimplisitkan ajaran dan nilai-nilai Islam ke dalam bidang studi umum seperti IPA, IPS, Matematika, dan bidang studi lainnya. Dengan demikian, kesan dikotomis menjadi hilang. Model pembelajaran yang cocok adalah team teaching yaitu guru bidang studi umum bekerja sama dengan guru bidang studi agama islam seperti Aqidah Akhlak, Fiqh, Quran Hadis, Sejarah Kebudayaan Islam untuk menyusun desain pembelajaran yang aplikatif dan detail untuk diimplementasikan dalam pembelajaran.

Secara sederhana, bagan di bawah ini memperlihatkan model kurikulum terpadu bagi madrasah dimana bidang studi rumpun agama Islam yang terdiri dari Aqidah Akhlak, Fiqh, Quran Hadis, Sejarah Kebudayaan Islam serta penciptaan suasana lingkungan yang religius harus menjadi komitmen bagi setiap warga madrasah dalam rangka mewujudkan madrasah sebagai wahana untuk membina ruh dan praktek keislaman. Bidang studi rumpun agama Islam merupakan inti sehingga bahan-bahan yang termuat dalam bidang studi umum PKN, IPS, IPA, Matematika, Seni Budaya, Penjaskes, Muatan Lokal, Keterampilan dan Bahasa harus dijiwai oleh pendidikan agama Islam. Bidang studi rumpun Agama Islam juga menjadi motivator dan dinamisator bagi pengembangan kualitas IQ (*intelligent Quotient*), EQ, (*Emotional Quotient*), CQ (*Creativity Quotient*) dan SQ (*Spiritual Quotient*). Muhaimin, (2007 : 217)

Bagan 5
Model Kurikulum Terpadu bagi Madrasah (Sebuah Alternatif)



Sumber : Muhaimin (2007 : 216)

Pengembangan Ciri Khas Madrasah bidang Keagamaan juga dapat ditandai dengan adanya berbagai kegiatan seperti meningkatnya program pendidikan agama secara optimal seperti penambahan jam pelajaran agama, semakin terhindarnya kegiatan pendidikan yang dikotomis antara pendidikan agama dengan pendidikan umum, terwujudnya suasana keagamaan yang tercermin dalam kehidupan ibadah dan perilaku, meluasnya kegiatan ekstra kurikuler yang menitikberatkan pada pengembangan kepribadian secara utuh dan semakin terpeliharanya pelaksanaan ajaran agama Islam di sekolah seperti kekeluargaan, harga diri, semangat kebersamaan dan lain-lain.

Pengembangan Ciri Khas Madrasah Unggul

Yang di maksud pengembangan ciri khas keunggulan madrasah oleh penulis di sini adalah;

Pertama, Penguasaan dua bahasa Asing (bahasa Arab dan Inggris). Salah satu yang ciri khas yang dimiliki madrasah adalah adanya bidang studi bahasa Arab yang wajib dipelajari oleh peserta didik selain bahasa Inggris atau bahasa Asing lainnya. Kenyataan ini seharusnya dimanfaatkan dengan baik oleh Madrasah untuk membuat suatu program unggulan dengan menitikberatkan pada bagaimana memfasilitasi siswa untuk menguasai bahasa asing bagi yang memiliki kemampuan atau bagi siswa yang memiliki bakat dan minat ke arah ini.

Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya, maka madrasah harus memiliki kesiapan dalam berbagai hal terutama pada ; 1) Kesiapan asrama bagi siswa yang mengikuti program ini. Kesiapan asrama penting dalam rangka penciptaan lingkungan bahasa (*biah al-lugah*) 2) Kesiapan Asrama bagi para ustazd dan utadzah yang akan membimbing mereka selama program ini berlangsung. 3) Kesiapan guru yang profesioanl dalam pembelajaran bahasa. 4 kesiapan dana baik untuk gaji guru maupun untuk biaya lain seperti biaya untuk proses pembelajaran, 5) Kesiapan sarana dan parasaran belajar seperti laboratorum bahasa

Minimal ada tiga standar kompetensi yang diharapkan untuk dimiliki siswa yang mengikuti program unggulan ini adalah ; 1) Dapat menggunakan bahasa asing secara aktif dengan lisan. Hal ini berarti mereka harus bisa menggunakan bahasa asing (bahasa Arab dan Inggris) secara aktif dengan orang lain dengan benar, sekaligus dapat memahami dengan benar bahasa yang dikemukakan oleh *native speaker*. 2) Dapat memahami bahasa kitab atau bahasa buku. Hal ini berarti siswa memahami bahasa kitab yang tertulis dalam bahasa Arab dengan menggunakan *ilmu sharaf, balagah, nahwu*) sebagai sarannya, demikian halnya dengan bahasa Inggris. 3) Dapat membuat tulisan dengan menggunakan bahasa Arab sesuai kaidah insya. Hal ini berarti, mereka dapat mengungkapkan ide dan pemikirannya dalam tulisan yang menggunakan bahasa Asing.

Kedua, Pengembangan Program Paket Pilihan. (P4). Sementara yang dimaksud dengan pengembangan program paket pilihan adalah, madrasah menyiapkan sebuah paket yang di dalamnya terdiri dari berbagai program khusus yang dipersiapkan bagi siswa Madrasah Tsanwaiyah dan Madrasah Aliyah yang tidak berniat untuk melanjutkan studi ke yang lebih tinggi (Perguruan Tinggi). Program yang dimaksud adalah program yang sesuai dengan kebutuhan lokal di mana madrasah itu berada. Di antara program yang di maksud adalah :

Pertama, Kewirausahaan seperti komputer, pengalengan ikan, menjahit, membuat kue, atau keterampilan lainnya yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Intinya adalah keterampilan yang dapat secara langsung dimanfaatkan oleh siswa setelah lulus sekolah itu. Dengan program ini, maka siswa yang lulus sekolah dan tidak lagi melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi tentu dapat mencoba untuk membuka usaha sendiri dengan modal keterampilan yang di bekali.

Ketiga, Program Da'i profesional. Masyarakat modern yang menghadapi berbagai persoalan hidup sangat membutuhkan siraman rohani dan pemahaman agama yang baik. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, maka dibutuhkan da'i yang memiliki keahlian dalam bidang dakwah, meskipun bukan pekerjaan yang muda untuk mempersiapkannya. Oleh karena itu, dibutuhkan kemampuan khusus untuk menjadi seorang da'i agama Islam yang profesional dalam menghadapi kondisi masyarakat yang terlilit oleh berbagai persoalan. Memang setiap umat Islam seharusnya memposisikan diri sebagai da'i, baik untuk diri, keluarga maupun masyarakatnya, akan tetapi da'i sebagai profesi dibutuhkan ilmu dan kemampuan khusus agar dalam menjalankan tugasnya lebih profesional, efektif dan optimal. Di antara kriteria da'i profesional adalah 1) menguasai ajaran agama Islam. 2) memahami bahasa Arab dengan baik 3) memiliki keahlian dalam membaca dan menulis Alquran dan hadis. 4) memiliki kemampuan berkomunikasi dan retorika, 5) mengetahui psikologi sosial dan lain-lain.

Dalam rangka tujuan ini, maka seharusnya madrasah memfasilitasi siswa yang memiliki kemampuan, bakat dan minat untuk mengembangkan potensinya agar dapat menjadi da'i yang profesional di masa datang.

G. PENUTUP

Jika dilihat dari semangat pemberian kekuasaan/wewenang pengembangan kurikulum ke satuan-satuan pendidikan (*devolution*), pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan mirip dengan konsep *school based curriculum development* (SBCD) di Australia yang mulai ditetapkan pertengahan tahun 1970-an, yang dalam tulisan ini penulis menggunakan istilah "Pengembangan Kurikulum Berbasis Madrasah".

Konsep *school based curriculum development* (SBCD) ini memiliki beberapa karakteristik yang secara umum mirip dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Di antaranya adanya partisipasi guru, partisipasi keseluruhan atau sebagian staf sekolah, variasi kegiatannya mencakup seleksi, adaptasi dan kreasi baru, adanya perpindahan tanggung jawab dari pemerintah pusat meskipun bukan keputusan tanggung jawab sama sekali, proses berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dan orang tua bahkan siswa dan ketersediaan struktur pendukung untuk membantu guru maupun madrasah. Apapun namanya, apakah Pengembangan Kurikulum Berbasis Madrasah atau Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan (KTSP), seharusnya pihak madrasah atau sekolah memanfaatkan semangat ini untuk mengembangkan madrasah dengan melibatkan seluruh potensi yang dimiliki untuk melahirkan generasi muda Islam yang bermutu.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hasyimi, Abd. Hamid. (1985). *Al-Rasul al-Araby al-Murabby*, Riyadh.
- Brady, Laurie (1947). *Curriculum Development (Third Edition)*, Victoria, Australia: Prentice Hall,
- Beauchamb, (1975). A. George. *Curriculum Theory*, Edisi III, Illinois Wilmette.
- Departemen Pendidikan Nasional (2006) Materi 10 – Penyusunan KTSP
- Departemen Pendidikan Nasional (2000) *Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 010/0/2000 tentang Tata Kerja Departemen Pendidikan Nasional*. Jakarta : Depdiknas.
- Fajar, Malik. (t.th). *Visi Pembaruan Pendidikan Islam*.
- Hasbullah, *Otonomi Pendidikan, Kebijakan otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*, Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2007
- Hamalik, Oemar. (2008). *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*. Edisi II, Bandung : Rosdakarya.
- Print, Murray. (1993). *Curriculum Development and Design*. Second Edition, New South Wales Australia : Allen & Unwim
- Ma'luf, Luis. (1986) *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*. Bairut : Dar al-Masyriq.
- Mulyasa, E. (2004). *Implementasi Kurikulum 2004*, Bandung : Remaja Rosdakarya
- Muhaimin, (2007). *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Madrasah, Sekolah dan Perguruan Tinggi*, Jakarta : PT Grafindo Persada.
- Syaodih, Nana. (2008). *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*, Bandung : Remaja Rosdakarya
- Syalabi, Ahmad. (1954) *History Of Muslim Education*, Beirut : Dar al-Kasysyaf.
- Shaleh, Abdurrahman, (2004). *Madasah dan Pendidikan Anak Bangsa*, Jakarta : PT Grafindo Persada.
- Suwito, (2005) *Sejarah Sosial Pendidikan Islam*, Jakarta : Kencana.
- [Rachel Bolstad \(2004\) http://www.nzcer.org.nz/pdfs/1314bib.pdf](http://www.nzcer.org.nz/pdfs/1314bib.pdf) *School Based Curriculum Development*, (15 Desember 2008)